

BAB V KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pasca penutupan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETi) di Desa Pancurendang berlangsung dalam struktur relasi kekuasaan yang timpang dan tidak partisipatif. Pemerintah kabupaten, sebagai aktor dominan, menjalankan kebijakan penutupan tambang secara top-down tanpa melibatkan aktor lokal secara bermakana. Kebijakan tersebut tidak diiringi dengan rencana transisi ekonomi yang berkelanjutan, serta gagal menjangkau kebutuhan rill masyarakat terdampak. Pemerintah desa, meskipun berada digaris depan dan memiliki kedekatan sosial dengan warga, hanya berperan administratif dalam pelaksanaan program bantuan. Lemahnya kapasitas fiskal, terbatasnya kewenangan, serta absennya ruang negosiasi menyebabkan pemerintah desa tidak mampu menjalankan peran strategis sebagai agen pemulihan lokal. Dalam perspektif teori relasi aktor, pemerintah desa kehilangan agensi karena tersubordinasi dalam struktur kekuasaan vertikal yang dikendalikan oleh aktor negara. Sementara itu, masyarakat terdampak, khususnya para mantan penambang, menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka kehilangan mata pencarian utama tanpa adanya ruang partisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Agensi mereka dibatasi oleh struktur sosial dan politik yang menempatkan mereka sebagai objek kebijakan, tidak hadir dalam proses pemulihan, menunjukkan lemahnya mekanisme akuntabilitas sosial dari sektor ekonomi informal.

Secara keseluruhan, ketimpangan relasi kuasa dalam proses pasca penutupan Pertambangan Emas Tanpa Izin telah menciptakan ekslusi sosial, lemahnya respons kebijakan, serta potensi munculnya resistensi tersembunyi dari masyarakat lokal. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya membangun mekanisme tata kelola yang mengakui agensi lokal, membuka ruang partisipasi yang adil, serta memperkuat koordinasi lintas aktor dalam menghadapi krisis sosial pasca penutupan tambang. Selain persoalan ketimpangan kekuasaan, salah satu temuan dari lapangan adalah minimnya interaksi dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam penanganan pasca penutupan PETI. Aktor -aktor seperti pemerintah kabupaten, pemerintah desa, Kementerian terkait, dan masyarakat terdampak tampak berjalan dalam orbit masing – masing tanpa membangun ruang komunikasi yang memadai. Hal ini terlibat dari pelaksanaan program bantuan yang bersifat parsial, tidak berkelanjutan, dan masih tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya, pelatihan pengolahan ketela dan bantuan alat produksi dari Kementerian koperasi dilakukan tanpa melalui proses pemetaan sosial yang mendalam,

sehingga dampaknya sangat terbatas dan tidak menjawab problem struktural pengangguran dan kehilangan mata pencaharian di kalangan mantan penambang.

